

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA (DIVISI KEIMIGRASIAN)**

PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Laporan Barang Milik Negara Satuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) sebagai Laporan Barang tingkat Satuan Kerja disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor : S-2/KN/2014 Tanggal 02 Januari 2014 tentang Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Kementerian /Lembaga.

A. Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.KU.05.03 Tahun 2009 tentang Percepatan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan Departemen Hukum dan HAM RI;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PL.04.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.PL.04.10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.

B. Entitas Pelaporan

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) merupakan salah satu entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Tingkat Satuan Kerja yang berkewajiban mengelola Barang Milik Negara dan Laporan Pertanggung jawaban atas pelaksanaan pendapatan maupun belanja barang dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara yang transparansi dan akuntabel

C. Periode Laporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) ini adalah Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2023

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Salah satu indikator akuntabilitas pengelolaan BMN dan transparansi pengelolaan keuangan dapat tercermin dari pelaporan BMN yang disusun secara periodik yang disajikan dalam neraca.

Pedoman Penatausahaan BMN dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PL.04.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. Peraturan tersebut telah ditetapkan guna tertib administrasi pengelolaan BMN yang mencakup penatausahaan BMN khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN yang handal perlu memperhatikan aspek informasi yang akan disajikan, untuk itu laporan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Kehandalan laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Untuk mencapai kualitas Laporan BMN tersebut, Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) merencanakan dan telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain :

1. Penggolongan/Kodefikasi

Penggolongan/Kodefikasi dilakukan agar BMN mudah untuk dikenali dan mudah untuk cari.

2. Kapitalisasi

Nilai Kapitalisasi sangat berpengaruh apakah BMN tersebut bisa atau tidak diinput ke dalam aplikasi MODUL SAKTI ASET.

3. Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data

Dalam rangka menjaga kehandalan laporan dan memastikan apakah semua transaksi yang mempengaruhi nilai BMN perlu dilakukan rekonsiliasi secara berjenjang baik internal dan eksternal.

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) telah melaksanakan rekonsiliasi data SAKTI MODUL PERSEDIAAN, SAKTI MODUL ASET, dan SAKTI MODUL GLP tingkat satuan kerja dimaksud pada Semester I Tahun 2023 untuk

Penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2023.

4. Penyusutan BMN

Pada saat rekonsiliasi semester I tahun 2023 menggunakan aplikasi Aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset, Penyusutan Barang Milik Negara merupakan pengurangan nilai Barang Milik Negara itu sendiri. Hal ini dikarenakan Barang Milik Negara yang ada semakin lama nilainya semakin berkurang/susut dan nilai tersebut sangat berpengaruh pada nilai Barang Milik Negara dimaksud.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna semester I tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian)

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Semester I Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp 0,- (*Nil Rupiah*),.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAKTI Modul Persediaan, Aset dan GLP;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER SEMESTER II TAHUN 2022

1. Saldo Awal 01 Januari 2023

Nilai BMN per 01 Januari 2023 menurut Neraca adalah sebesar Rp 0,-(*NOL*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (0) sebesar Rp 0,-(*NOL*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 1.850.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara semester II tahun 2022

periode semester I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. *Barang Persediaan*

Saldo Persediaan pada Satuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) per 30 Juni sebesar Rp 0,-(*NOL*),.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Barang Konsumsi (117111)	0,-		0,-
JUMLAH	0,-		0,-

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp 0,-(*NOL*) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,-(*NOL*) dan kondisi usang senilai Rp 0,-(*NOL*).

b. *Tanah*

Saldo Tanah pada Satuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) *per 30 Juni 2023* sebesar Rp 0,-(*NOL*). *Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m2 dengan nilai sebesar Rp 0,-(NOL), mutasi tambah seluas 0 m2 dengan nilai sebesar Rp 0,-(NOL), dan mutasi kurang seluas 0 m2 dengan nilai sebesar Rp 0,-(NOL).*

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
	Rp 0,-
	Rp 0,-
	Rp 0,-

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
	Rp 0,-
	Rp 0,-
	Rp 0,-)

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	0	Rp 0,-)
Rusak Ringan	0	Rp 0,-)
Rusak Berat	0	Rp 0,-)

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m² / **Rp 0,-)**

Tidak Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan yaitu :

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	0	Rp 0,-)
	0	Rp 0,-)

c. **Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Tahun per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 0,- (NOL), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 0,- (NOL), mutasi tambah sebesar Rp 0,- (NOL), dan mutasi kurang sebesar Rp 0,- (NOL).

1. Rincian *mutasi Peralatan dan Mesin* adalah sebagai berikut:

sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin yang merupakan barang ekstrakomtable. Saldo barang ekstrakomtable pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Tahun per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- (*No! Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar Rp 1.850.000 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar (*Satu Juta Delapan Ratus*

Lima Puluh Ribu Rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0,- (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 0,-, dan mutasi kurang Rp 1.850.000 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar *(Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* karena ditransfer

Mutasi Tambah *barang Ekstrakomptabel pada akun Peralatan dan Mesin* tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0,-	0,-
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	0,-	0,-
Total		0,-

Mutasi Kurang *barang Ekstrakomptabel pada akun Peralatan dan Mesin* tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0,-	593.750
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	0,-	450.000
Total		Rp 1.043.750

Dari jumlah 0 *sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin* di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar Rp0,- sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah Rp0,- kuantitas (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar Rp0,-.

Dari jumlah Rp0,- sesuai bidang barang pada akun Peralatan dan Mesin) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
	0	
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang ...(sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut)... yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0,-

1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian Jenis Transaksi	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Akumulasi Penyusutan peralatan mesin ekstrakomptabel	(Rp.0,-)

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Tahun per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Tahun per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar . 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah).

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah 0 (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 0,-

Dari jumlah 0 (sesuai bidang barang pada akun Gedung dan Bangunan) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang ...(sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut)... yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 /Rp 0.- .

- 2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Tidak memiliki Gedung dan Bangunan

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Saldo Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Saldo Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Tahun per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar . 0 dengan nilai sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

2) Mutasi Tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah 0 (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah

sejumlah 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 0,-, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 0,-,

Dari jumlah 0 (sesuai bidang barang pada akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0,- (paragraf berikut diisi informasi lainnya yang perlu untuk diungkapkan terkait Penatausahaan dan pengelolaan BMN tersebut) .

- 3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tidak memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan

f. Aset Tetap Lainnya

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,-. mutasi tambah sebesar Rp. 0,-. dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Saldo Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp0,- mutasi tambah jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-. dan mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-..

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya

(sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

(sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah 0 (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp 0,- sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp .0,- Dari jumlah 0 (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang ...(sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut)... yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Aset Tetap lainnya 0 unit/Rp 0,-

- 1) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Tidak memiliki Aset Tetap lainnya

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar Rp 0,- sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar Rp 0,-

h. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah sebesar Rp. 0,-, dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,-.

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,-. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar Rp0,-, mutasi tambah jumlah barang 0 (*sesuai dengan satuan barang masing-masing*) dengan nilai sebesar Rp. 0,-, dan

mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Mutasi Tambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Semester I 30 Juni 2023 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah		
2. Peralatan Mesin		
3. Gedung dan Bangunan		
4. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		
5. Aset Tetap Lainnya		
JUMLAH		

Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

...(dijelaskan besaran penyusutan dengan merinci per akun neraca)...

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I 30 Juni 2023. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp0,- mutasi tambah jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-

masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-. dan mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi *Tambah* Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-
-	-
-	-

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas , yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,- sedang dalam proses penghapusan / pemindahtanganan adalah 0 kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp0,-.

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Aset Tak Berwujud 0 unit/Rp 0,-

3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Per 30 Juni 2023. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp0,- mutasi tambah jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-. dan mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada ...(1)... per...(22)... per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah		
2. Peralatan Mesin		
3. Gedung dan Bangunan		
4. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan		
5. Aset Tetap Lainnya		
JUMLAH		

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah (*tidak memiliki bmn*)

4) BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Per 30 Juni 2023. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp0,- mutasi tambah jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-. dan mutasi kurang jumlah barang 0 (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	-
Perubahan / Koreksi Barang Bersejarah (positif)	-

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan / Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	-
Penghapusan Barang Bersejarah	-

3. Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I per 30 Juni 2023

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra komptabel		Ekstra Komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
II	Aset Tetap						
1.	Tanah	0	0	0	0	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
6.	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	0	0	0	0	0	0
III	Aset Lainnya						
1.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0	0	0	0
2.	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3.	Aset Yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (3)	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Per 30 Juni 2023 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intra komptabel		Ekstra Komptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0	0	0	0	0	0
III	Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
1.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0	0	0	0
2.	Aset Yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Divisi Keimigrasian) Semester I Per 30 Juni 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	0	0	0
2	Tanah	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7	KDP	0	0	0

8	Aset Tak Berwujud	0	0	0
9	Aset Lain-Lain ^{*)}	0	0	0
Total		0	0	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp 0,-... dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1)
- 2)

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1				
2				
3				
4				
5				

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Semester I Per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin		
3	Gedung & Bangunan		
4	Jalan		
5	Irigasi		
6	Jaringan		

7	Aset tetap lainnya		
8	Aset Tak Berwujud		
Jumlah			

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN tersebut. Bila tidak ada yang perlu disampaikan, isian ini dapat ditiadakan).

1

2

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Pengguna- An	Pemanfa- atan	Pemindah- Tanganan	Penghapu San	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses pengelola barang					
4	Selesai di pengelola barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan keputusan dari Pengguna barang					
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/ batal dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut: (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan)

1

2

(Paragraf berikut diisi keterangan/ informasi yang perlu diungkapkan terkait pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut (bila tidak ada, uraian ini dapat ditiadakan).

1

2

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN <i>idle</i>	-
2.	Ditetapkan sebagai BMN <i>idle</i> oleh Pengelola	-
3.	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>idle</i> oleh Pengelola	-
4.	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5.	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

d. Permasalahan pelaksanaan penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a.
- b.

3. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Keuangan , antara lain sebagai berikut:

4. Penerimaan Negara yang berasal dari Pengelolaan BMN

Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari Penjualan pada periode , antara lain sebagai berikut:

5. Matriks Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut Satker atas rekomendasi BPK dan Itjen pada Laporan Hasil Pemeriksaan.

Matriks Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut Satker atas rekomendasi BPK dan Itjen pada Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- a.
- b.

6. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

a.

b.

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor

Antonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001